

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

OLEH :

MHD. SYAHFRIARDAN

NIM : 52.15.100.9

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Sarjana Strata Satu (S1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

MHD. SYAHFRIARDAN

NIM : 52.15.100.9

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Syahfriardan
Nim : 52151009
Tempat/Tgl Lahir : Sukajadi, 18 Nopember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Teluk Dalam Dusun II Desa Perk. Teluk Dalam Kec.
Teluk Dalam Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ASAHAN”** benar karya asli saya, kecuali dengan kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruab di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat engan sebenarnya.

Medan, Agustus 2020

Yang Membuat pernyataan



Mhd. Syahfriardan

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Oleh:

MHD. SYAHFRIARDAN

Nim. 52151009

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S, Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 18 Agustus 2020

Pembimbing I



Zuhrial M. Nawawi, MA

NIP. 19760818 200710 1 001

Pembimbing II



Kamila, SE, AK, M. Si

NIP. 19791023 200801 2 014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



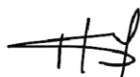
Hendra Harmain, M.Ed

NIP. 197305101998031003

Skripsi berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan” an. Mhd. Syahfriardan, NIM 52151009 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 9 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, Nopember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302
NIP. 19730510 199803 1 003

Sekretaris,



Kusmilawaty, SE.Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

Pembimbing I



Zuhrial M Nawawi, MA
NIDN. 2026017602
NIP. 19750213 200604 1 003

Pembimbing II



Dr. Kamila, SE.Ak, M.Si
NIDN. 2023107901
NIP. 19791023 200801 2 014

Penguji I



Dr. Sugianto, MA
NIDN.2007066701
NIP. 19670607 200003 1 003

Penguji II



Kusmilawaty, SE.AK, M.Ak
NIDN. 2014068001
NIP. 19800614 201503 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Penulis Mhd. Syahfriardan (2020), NIM 52151009. Skripsi berjudul “**Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asahan)**”. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Zuhri M Nawawi, MA dan Ibu Kamila, SE, AK, M. Si sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tiga variabel bebas yaitu Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Last Square*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan serta data dari sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hipotesis penelitian menggunakan ujiI persamaan linier berganda, uji parsial (uji t) dan koefisien determinan (uji R^2). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Hotel berpengaruh secara signifikansi sebesar 0.0016, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran juga memiliki pengaruh secara pasrisal dengan nilai signifikansi masing-masing 0,0016 dan 0,0001. Secara simultan atau bersama-sama sebesar 93,8% sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi faktor-faktor lainnya.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa diucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dengan kealfaan dalam bertindak dan berpikir. Sholawat dan juga salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta dengan keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kelak di yaumul akhir kita semuanya sebagai umatnya mendapat syafa'atnya. Aamiin

Terucap rasa syukur yang tiada terhingga karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan**” dengan lancar tanpa memiliki kesulitan yang berarti.

Dalam penulisan skripsi ini bahwa disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari beragam pihak. Sebab tanpanya ada pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada:

1. Teruntuk orang yan paling teristimewa di dalam kehidupan penulis, yakni kedua orangtua penulis Bapak penulis Tugimin, Mamak Marlina, dan Abang dan Adik Penulis Mhd. Syafii, Tria Silvia, dan Hijri Wahdah Assabil yang telah mendukung secara penuh beriring doa hingga sampai sejauh ini penulis mendapatkan gelar Sarjana.
2. Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Andi Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan Wakil Dekan I, II, III.

4. Bapak Hendra Harmain, SE., M.Pd. dan Ibu Kusmilaty SE., M.Si selaku Ketua Dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Dosen Pembimbing Skripsi I penulis yakni Bapak Zuhrinal M Nawawi, MA dan Dosen Pembimbing II sekaligus penasehat akademik penulis yakni Ibu Kamila, SE.Ak.,M.Si
6. Seluruh Dosen Febi UIN Sumatera Utara dan staff akademik dan perpustakaan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan.
8. Keluarga Besar seluruh senior hebat dan junior tangguh IMMawan dan IMMawati Pimpinan Komisariat IMM FEBI UINSU serta Seluruh jajaran BPH Pimpinan Cabang IMM Kota Medan P.A 2019/2020.
9. Keluarga Besar Korps Instruktur PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dan Keluarga Besar PC Pemuda Muhammadiyah TS II.
10. Keluarga Besar Alumni Duta Pariwisata Kabupaten Asahan.
11. Keluarga Besar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Komunikasi Mahawasiswa Asahan.
12. Untuk sahabat-sahabatku sedari kecil hingga sekarang 5 Milimeter
13. Seluruh Rekan Juang Sahabat AKS-B angkatan 2015 dan Teman-teman KKN Tematik Ramadhan Tahun 2018 Desa Onan Runggu Kabupaten Samosir.
14. Sultan Mehmed II (Al-Fatih) Sang penakluk Konstantinopel yang sudah mengalirkan jiwa serta energi semangat juangnya kepada penulis pribadi sebagai bukti baktinya terhadap Islam.

15. Semua pihak atau rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

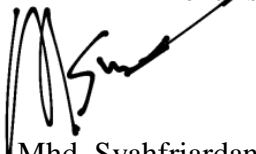
Penulis sudah berupaya dengan semampunya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis sadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam hasil akhir penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, baik sekiranya terdapat kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan pada akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt, semoga kiranya berkenan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu dan berharap skripsi bisa berguna serta bermanfaat bagi kita semuanya. Aamiin

Alhamdulillahirabbila'lamin

Wasalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2020

Penulis



Mhd. Syahfriardan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori	10
1. Otonomi Daerah	10
2. Pajak	11
a. Pengertian Pajak	11
b. Fungsi dan Jenis Pajak	12
3. Pajak Daerah	15
a. Jenis Pajak Daerah	16
4. Pendapatan Asli Daerah	20
5. Industri Pariwisata	25
6. Pandangan Islam Terhadap Industri Pariwisata	32
B. Kajian Terdahulu	36
C. Kerangka Teoritis	38
D. Hipotesa	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	40
B. Defenisi Operasional	40
1. Variabel Independen	41
2. Variabel Dependen	41

C. Tempat Dan Waktu Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	42
1. Populasi	42
2. Sampel	42
E. Jenis Data dan Sumber	42
F. Responden Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	43
3. Observasi	44
H. Teknik Analisis Data	44
1. Statistik Deskriptif	44
2. Uji Asumsi Klasik	45
a. Uji Normalitas	45
b. Uji Heteroskedastisitas	46
c. Uji Autokorelasi	46
3. Metode Regresi Linear	47
4. Pengujian Hipotesis	48
a. Koefisien Determinasi	48
b. Uji Statistik t	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Asahan	51
1. Profil Kabupaten Asahan	51
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kab. Asahan	54
a. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	54
b. Struktur Organisasi Dispora Asahan	56
B. Hasil Penelitian	57
1. Analisis Data	57
2. Deskripsi Data Penelitian	67
3. Uji Asumsi Klasik	69

a. Uji Normalitas	69
b. Uji Heroskedastisitas	70
c. Uji Autokorelasi	71
4. Metode Regresi Linear	73
5. Pengujian Hipotesis	74
a. Uji Model R2	76
b. Uji t	76
6. Intepretasi Hasil Penelitian	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sebagai salah satu bagian integralisasi dari pembangunan skala nasional, merupakan sebuah upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan suatu pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan berjalannya pembangunan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Pembangunan daerah juga mengartikan memberikan kemampuan dan wewenang terhadap sebuah daerah melalui dari pemerintah pusat untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya secara berdaya guna untuk kemajuan daerahnya serta kesejahteraan masyarakat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan yang luas dan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dengan tanggung jawab terhadap wilayah daerahnya secara proposional dan etos tanggung jawab. Hal ini berarti menandakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan suksesnya pembangunan sebuah pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah yang disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal, dalam hal ini menimbulkan terdapatnya permasalahan baru yang disebabkan kesiapan fiskal disetiap daerah berbeda-beda.

Perlunya kreatifitas dan pengelolaan secara baik dan berkala dalam pengembangan potensi sumber daya suatu daerah sangatlah dibutuhkan dalam menjaga asset daerah. Dalam mengembangkan sumber daya pada suatu daerah, terdapatnya dampak positif ataupun negatif terhadap sumber daya yang terkait pada dasarnya tergantung bagaimana penataan serta pengelolaan sumber daya yang dalam hal ini digerakan serta diperankan langsung oleh unsur pemerintah suatu wilayah, industri dan masyarakat sekitar lingkungan suatu daerah. Sumber daya yang terdapat pada suatu daerah apabila dikembangkan secara baik dan maksimal dapat menjadi produk yang mampu memberikan kontribusi terhadap

pemasukan pendapatan suatu daerah dan berdampak positif terhadap perkembangan tingkat perekonomian masyarakat setempat. Namun, apabila sumber daya daerah tidak dikelola dengan baik, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap pemasukan keuangan sebuah daerah dan mengurangi pemasukan terhadap pendapatan asli daerah.

Sektor Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sumber kekayaan negara non migas yang menghasilkan pemasukan devisa negara yang sangat signifikan membantu serta mempengaruhi tingkat laju perekonomian skala nasional Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat secara langsung.² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis terhadap pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Bahwasannya tertuang peraturan yang mengatur tentang pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta secara langsung masyarakat, pemerataan dan juga keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman sebuah daerah.

¹ Cohen, E. " *Toward a Sociology of International Tourism* ", Sociological Research 39: 1984. h.164-185

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah.³

Dalam rangka proses pembiayaan pembangunan suatu daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki fungsi yang sangat penting posisinya. Hal ini berorientasi terhadap potensi yang dimiliki masing-masing suatu daerah, dalam penerimaan serta pemasukan pendapatan suatu daerah dapat meningkatkan kemampuan dan penerimaan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengikuti dengan perkembangan dan tuntutan perkenomian daerah yang saat sekarang ini semakin terintegrasikan dengan perekonomian nasional dan perkeonomian Internasional, maka kemampuan pengelolaan manajemen yang baik dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan yang dapat meningkatkan lebih lagi Pendapatan Asli Daerah di sebuah wilayah menjadi sangat penting untuk diperhatikan pengelolaannya.

³ Tiara Apriani Putri Jessy, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata", *Journal Administrasi Negara*, Vol.5 No.3, h.1604.

**Tabel 1. 1 Rincian Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten
Asahan Tahun 2014-2019**

Pajak Daerah			
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Asahan			
No	Tahun	Target	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
1	2014	258.104.500,00	213.165.000,00
2	2015	258.104.500,00	204.482.000,00
3	2016	956.000.000,00	254.369.512,00
4	2017	1.008.000.000,00	359.620.540,00
5	2018	1.137.500.000,00	348.881.528,00
6	2019	1.140.000.000,00	355.438.797,00

Sumber : Bappenda Kabupaten Asahan (Data diolah)

**Tabel 1.2 Rincian Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten
Asahan Tahun 2014-2019**

Pajak Daerah			
Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Hiburan Wisata Kabupaten Asahan			
No	Tahun	Target	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)
1	2014	44.484.200,00	41.194.000,00
2	2015	50.000.000,00	71.612.500,00
3	2016	418.840.000,00	115.949.025,00
4	2017	440.000.000,00	407.125.575,00
5	2018	707.500.000,00	791.735.255,00
6	2019	2.150.894.050,00	2.447.572.294,00

Sumber : Bappenda Kabupaten Asahan (Data Diolah)

**Tabel 1.3 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Asahan Tahun 2014-2019**

Pajak Daerah			
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Asahan			
No	Tahun	Target	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
1	2014	537.688.600,00	511.754.457,00
2	2015	537.688.600,00	485.295.604,00
3	2016	1.400.000.000,00	667.570.755,00
4	2017	1.475.000.000,00	891.957.385,00
5	2018	1.716.800.000,00	1.078.182.228,00
6	2019	1.830.648.653,00	2.032.882.355,00

Sumber : Bappenda Kabupaten Asahan (Data diolah)

Setiap daerah pasti memiliki upaya keinginan untuk terus dan tetap meningkat penerimaan keuangan Pendapatan Asli Daerah dengan mencari dan mengelola sumber pendapatan baru ataupun memaksimalkan pendapatan penerimaan daerah yang sudah ada. Kabupaten Asahan merupakan salah satu bagian dari Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi pengembangan yang cukup besar dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Posisi geografis Kabupaten Asahan dalam konstelasi regional sebenarnya cukup lumayan strategis. Hal ini dapat diukur dan dilihat dengan adanya Jalan Lintas Sumatera yang melewati garis teritorial wilayah, dan jaraknya yang relatif dekat dengan Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang. Dalam konteks kancan lintas nasional, kota yang memiliki peranan yang cukup penting sebagai pintu masuk utama Kabupaten Asahan adalah merupakan : Kota Jakarta, Pekanbaru, Padang, dan khususnya Kota Medan. Kota-kota tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam memainkan peran ekonomi untuk

Kabupaten Asahan dan mendukung perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Asahan.⁴

Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Pemerintah Kabupaten Asahan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut.

Tabel 1,4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan Tahun 2014-2019			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2014	87.058.405.439,00	91.467.858.558,86	105,07
2015	95.287.879.761,00	98.279.308.428,18	103,14
2016	104.918.290.355,80	119.498.541.230,48	113,90
2017	129.630.330.203,10	123.687.304.878,59	95,42
2018	149.520.487.113,29	142.974.081.720,99	95,42
2019	167.800.000.000,00	149.644.040.000,00	89,18

Sumber : Bappenda Kabupaten Asahan (*diolah*)

⁴ Website Resmi Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Asahan, *asahankab.bps.go.id* Diakses pada tanggal 1 Mei 2020

Salah satu pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Asahan adalah yang berasal dari sumber pajak sektor pariwisata. Pariwisata adalah salah satu potensi daerah yang tentu akan menjadi ciri khas komoditas pemasukan daerah, namun berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran masih mengalami belum mencapai target dari realisasi penerimaan pajak tiap tahun pengamatannya,

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai seberapa besarkah pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran yang berkaitan pariwisata di Kabupaten Asahan terhadap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan. Merujuk lebih lanjut dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asahan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya melalui latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang masih terjadi disektor bidang pariwisata Kabupaten Asahan.

1. Penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran merupakan salah satu bagian dari penerimaan daerah yang cukup besar dan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Asahan.
2. Ditinjau melalui sektor pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak, hiburan wisata dan pajak restoran selama tahun pengamatan mengalami penurunan pada beberapa tahun yang dikhawatirkan dapat menyebabkan menyebabkan kedepannya tidak mencapai target yang ditentukan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Asahan belum maksimal dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel, pajak wisata hiburan, dan pajak restoran.

C. Pembatasan Masalah

Agar dapat terfokus terhadap bahan pokok inti penelitian ini, maka perlunya diberlakukan pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran Kabupaten Asahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Asahan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Asahan ?
2. Apakah kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Asahan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan ?
3. Apakah kontribusi pajak restoran di Kabupaten Asahan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan ?
4. Apakah kontribusi Pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Asahan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, adapun penelitian ini dibuat bertujuan sebagai bahan untuk mengetahui potensi kontribusi pajak sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran yang berada di

daerah Kabupaten Asahan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan dalam penambahan pengetahuan dengan mengkorelasikan terhadap data yang ada mengenai pengaruh kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran di Kabupaten Asahan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Terlebih utamanya lagi, penulis merupakan bagian dari Duta Wisata Asahan yang memiliki fungsi sebagai mediator penyampai dan promotor untuk mengajak masyarakat Kabupaten Asahan agar lebih peduli terhadap perkembangan Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Asahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terlebih khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan khususnya untuk mengupayakan peningkatan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata Kabupaten Asahan dan memperkuat posisi pentingnya sektor pariwisata dalam membina daerah otonom di Indonesia serta meningkatnya pemasukan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.

c. Bagi pembaca dan almamater.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi yang berketerkaitan dengan isi penelitian dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang kontribusi pajak hotel, pajak hiburan serta pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Dikeluarkannya peraturan UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menandainya awal mula pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Peraturan otonomi daerah sebagai sebuah konsep dasar yang menandakan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kekuasaannya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri dan berdikari secara sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah berarti tidak adanya wewenang pemerintah pusat terhadap kebijakan di daerah Kabupaten atau Kota kecuali dalam bidang keuangan moneter, pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri dan agama. Dengan demikian masing-masing daerah diharuskan untuk dapat memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam membangun kehidupan di daerah seperti apa yang diharapkan.

Dengan pemberlakuan Otonomi Daerah hal ini tidak hanya menyoal sebatas penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada daerah saja, akan tetapi kesiapan serta kesanggupan tiap-tiap daerah untuk melaksanakan serta merealisasikan tugas permasalahan daerah masing-masing. Salah satu poin penting tingkat keberhasilan dalam peraturan otonomi daerah adalah pemaksimalan daerah untuk dapat mengembangkan potensi-potensi terdapat di daerahnya secara optimal untuk kesejahteraan dan kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah diharuskan untuk dapat mengambil kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk kemajuan dan keberhasilan daerahnya.

Prinsip yang direalisasikan dalam peraturan otonomi daerah adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang mengartikan bahwa setiap seluruh daerah yang berada di Republik Indonesia diberikan hak kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan membuat kebijakan daerah sendiri untuk dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat, peningkatan peran serta prakarsa daerah, dan pemberdayaan untuk masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tujuan utama dalam penyelenggran peraturan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan serta peran daerah masing-masing dalam peningkatan perekonomiannya. Pda dasarnya terdapat tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya yakni :

1. Dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya serta potensi daerah
3. Memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat keseluruhan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Yang dimaksudkan dengan pajak adalah suatu pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan atau dipergunakan oleh pemerintah dalam hal untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat bersifat paksa dan tanpa timbal balik secara langsung. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses penunjang pembiayaan pembangunan dalam suatu daerah. Untuk

itu, perlulah kiranya harus terdapat penyamaan pandangan dalam mengartikan pajak.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi dan Jenis Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua macam fungsi dalam pembagiannya, antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.⁶

⁵ Siti Resmi, *Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba empat. 2011), h.15

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h6

Sedangkan jenis-jenis pajak juga dibagi beberapa macam golongan bagiannya, antara lain pembagiannya adalah sebagai berikut :⁷

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, ialah pajak yang dipungut secara periodik menurut kohir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak PeneranganJalan, dan sebagainya.

b) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang dipungut secara incidental (pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa berkohir dan tanpa surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif (Pajak Perorangan), ialah pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), di mana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif (Pajak Kebendaan), ialah pajak yang berpangkal atau mendasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPnBM, dan PBB.

⁷ Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, : Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 .h 137-145

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, di mana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.
- b) Pajak Daerah, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

4. Menurut Dari Tarif Pajak yang Dikenakan

- a) Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atau tetap tanpa melihat berapapun dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Bea Materai.
- b) Pajak Proporsional, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Contohnya PPN, PBB, dan BPHTB.
- c) Pajak Progresif, ialah pajak yang dikenakan dengan persentase tarif yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*) dari wajib pajak. Contohnya PPH wajib pajak orang pribadi.

- d) Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*) dari wajib pajak). Dewasa ini di Indonesia tidak ada pajak yang dipungut dengan tarif degresif, sehingga tidak ada jenis pajak yang termasuk pajak degresif di Indonesia.

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁸

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 menyebutkan, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah

^{8 8} Siahaan, Marihot P,S.E, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.7

kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

a. Jenis Pajak Daerah

1) Pajak Provinsi, meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau peenguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

2) Pajak Kabupaten/Kota,

- a) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- b) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatannya termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- c) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- d) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- e) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah badan, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya. Dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- f) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

- h) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- i) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- j) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa. yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud

Sektor pariwisata adalah merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan laju tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengutipan pajaknya. Suatu tingkat keberhasilan terhadap pengembangan sektor pariwisata pada suatu daerah, dapat juga mempengaruhi meningkatnya kontribusi dari sektor perdagangan, hotel dan sektor restoran terhadap peningkatan PDRB, serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan APBD. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, mengukur kemandirian keuangan daerah serta mengukur aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dananya untuk pelayanan publik.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan seluruh daerah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah Kabupaten/Kota diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkuman

pertumbuhan seluruh sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Harga Konstan dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan Tahun 2016-2018

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	29.206.693,06	22.302.704,98	5,62
2017	32.020.190,40	23.525.345,73	5,48
2018	34.666.912,65	24.844.068,11	5,61

Sumber : PDRB Kabupaten Asahan, 2016-2018 (BPS)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengacu terhadap UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.⁹

Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

⁹ Darise, Nurlan "Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2" Jakarta : PT. Indeks, 2009

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang di terima oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber potensi yang ada pada daerah yang harus diolah dan dikelola oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menyatakan bahwa:

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah :

Yang dimaksudkan dengan Pajak Daerah merupakan pemasukan keuaangan yang berasal dari penetapan pajak-pajak yang berlaku di suatu daerah. Yang mana pajak daerah berasal dari pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah daerah. Contoh : Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yang telah di atur dalam peraturan daerah masing-masing serta hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁰

¹⁰ Bambang Kesit "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" Yogyakarta : UII. Press, 2003

Pajak daerah dapat dijelaskan menurut wilayah kekuasaan bagi pihak pemungutnya. Berikut penjelasan mengenai wilayah pemungutan pajak daerah :

i. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi, sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

ii. Pajak Kabupaten atau Kota :

Jenis pajak kabupaten, sebagai berikut :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan.
4. Pajak pengambilan bahan.
5. Pajak parkir.
6. Pajak air tanah.
7. Pajak sarang burung walis.
8. Pajak bumi, pedesaan, dana perkotaan.
9. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya budgettair tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Retribusi Perizinan tertentu

Adalah bentuk retribusi atas kegiatan tertentu dalam sebuah pemerintahan daerah dalam rangka memberikan hak izin kepada orang personal ataupun badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian, serta pengawasan atas suatu kegiatan, pemanfaatan ruang, pemanfaatan serta penggunaan sumber daya alam daerah, barang, prasarana/fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun yang termasuk ke dalam golongan jenis-jenis perizinan tertentu antara lain:

- a. Retribusi ijin mendirikan bangunan
- b. Retribusi ijin tempat penjualan
- c. Retribusi ijin gangguan
- d. Retribusi ijin trayek

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan yang dimiliki oleh daerah adalah bagian dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya menyeluruh milik pemerintah daerah maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya hanya sebagian. Jenis pendapatan ini dapat digolongkan menurut objek cakupannya yakni :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

5. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Giro
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan jasa oleh daerah

5. Industri Pariwisata

Empat aspek pengembangan kawasan pariwisata yang dikaji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (2009) (daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana dan sarana, serta dukungan sosial masyarakat)

1. Daya Tarik Wisata : Sesuatu yang menjadikan sebuah obyek wisata memiliki kemenarikan serta memberi kesan ingin berkunjung kembali, kemenarikan merchandise, harga tiket masuk (biaya retribusi), kebersihan daya tarik wisata, kenyamanan berada pada daya tarik wisata, kepuasan wisatawan terhadap fasilitas di daya tarik wisata.
2. Aksesibilitas : Transportasi dan kemudahan segala akses yang dipergunakan menuju suatu objek wisata, ketersediaan petunjuk jalan, ketersediaan akses informasi yang menarik mengenai suatu objek wisata. Kondisi suatu jalan yang dilalui menuju tempat objek wisata, serta durasi waktu yang dibutuhkan menuju lokasi objek wisata.
3. Prasarana-sarana : Kemudahan dalam menemukan informasi dan komunikasi terkait objek wisata, ketersediaan air bersih dan kebersihan toilet umum, keberadaan tempat penginapan, ciri khas kuliner makanan objek wisata, pelayanan, keberadaan lokasi penjual cinderamata yang menjadi ciri khas suatu lokasi objek wisata.
4. Dukungan Sosial :
 - a. Dinas Pemerintah
Dinas Pariwisata dalam hal ini yang memiliki wewenang mandataris khusus dalam pengelolaan dan pengembangan suatu objek wisata. Kesiapan Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

b. Masyarakat Sekitar

Kesediaan serta kebiasaan masyarakat setempat yang menjadi karakteristik tersendiri untuk melakukan aktivitas kebudayaan dan keseharian yang menjadikan keramahan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur dan membahas tentang kepariwisataan, yang dimaksudkan dengan objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan(2009), obyek wisata atau daya tarik wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis padaa anugerah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti :

- 1) Pantai dengan keindahan pasir putihnya, deburan gelombang ombak serta akses pandangnya terhadap matahari terbit atau tenggelam.
- 2) Laut dengan aneka kekayaan terumbu karang maupun dengan beragam jenis ikannya
- 3) Danau dengan keindahan panoramanya serta deburan ombaknya
- 4) Gunung dengan daya tarik vulcano dan suasana pegunungannya
- 5) Hutan dan Sabana dengan keaslian flora dan faunanya
- 6) Sungai dengan kejernihan air dan deras arum jeramnya
- 7) Air terjun dengan panorama keindahan kesegaraannya serta kecuramannya

- b. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak beraptoakan dan berbasis pada hasil karya dan hasil hasil cipta kreasi dari manusia, baik yang berupa peninggalaan budaya (situs/heritage) maupun nilai budaya yang masih hidup dan massih dilakukan dalam kehidupan disuatau daerah masyarakat tertentu, yang masih dapat baik berupa bentuk upacara ritual, adat istiadat, seni pertunjukan, seni sastra, seni rupaa, ataupun keunikan karakteristik sehari-hari di dalam kehidupan yang dimiliki oleh suatu masyarakat.
- c. Daya tarik wisata minat khusus (*special interest*) adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berpaatokaan pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti pengamatan satwa tertentu (*birds watching*), memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*),arum jeram, Golf (*sport*), wisata agro, gambling/casino, menghadiri peertemua, rapat, perjalan insentif, pameran dan wisata khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seseorang wisatawan.

Pariwisata saat sekarang ini sudah di golongankan sebagai industri yang dapat diandalkan sebagai salaah satu pemasok utama devisa. Hal ini disebabkan perkembangan dalam pariwisata sangat terkait dengan kemajuan dan peningkatan ekonomi suatu daerah, sosial, srta kekayaan budaya.

Pengembangan suatu objek wisata dalam suatu daerah diperhitungkan banyak memiliki dampak poistif dan mempengaruhi peningkatan aspek yang lainnya dalam sebuah negara. Untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah/daerah dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) dan pendekatan permintaan wisatawan (*tourist demand*) terhadap barang dan jasa. Pengeluaran wisatawan adalah pengeluaran yang dilakukan wisatawan

selama melakukan perjalanan wisata. Pengeluaran wisatawan dapat berupa akomodasi perhotelan, konsumsi restoran dan makanan, angkutan wisata, atau jasa-jasa lainnya. Permintaan langsung wisatawan dapat digunakan untuk melihat kontribusi wisatawan terhadap PDRB.¹¹

Oleh karena itu, jika dilihat dari segi strategis negara Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau yang tersebar luar di wilayah Indonesia, menjadikan komoditas Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi salah satu sumber pemasukan devisa keuangan negara yang bukan migas (non migas) yang sangat berpengaruh terhadap tingkat laju perekonomian secara nasional. Industri pariwisata juga menjadi salah satu keunggulan daya saing ekonomi secara nasional, hal ini juga didukung oleh beberapa daerah yang memiliki keunggulan sektor pariwisata di Indonesia salah satunya yakni Provinsi Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara termasuk juga Provinsi Sumatera Utara.

Sektor Industri Pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik hal ini juga disebabkan terdapat faktor pendukung lainnya yang menjadikan industri pariwisata menjadi komoditas perekonomian nasional. Faktor pendukung tersebut adalah seperti halnya penyediaan jasa transportasi, terdapatnya penyediaan hotel dan penginapan, penyediaan restoran yang menjadikan sektor wisata kuliner tersendiri, dan juga beberapa faktor pendukung lainnya yang menjadikan sektor industri pariwisata berjalan dengan baik serta berdampak terhadap peningkatan perekonomian sebuah negara.

¹¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Tahun 2001

**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA
TAHUN 2017**

No	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)																								SUB JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BULAN																										
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGU		SEP		OKT		NOV		DES		NAS	M N	
		NAS*	MN**	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N	NAS	M N			
1	AIR TERJUN PONOT	493	2	258	0	516	2	255	6	237	4	1.105	0	415	0	332	6	386	8	256	2	382	6	553	21	5.188	57	5.245
2	DANAU KELAPA GADING	198	0	211	0	236	0	189	0	248	0	896	0	475	0	412	0	780	0	385	0	345	0	518	0	4.893	0	4.893
3	DANAU TERATAI	338	0	277	0	275	0	392	0	247	0	821	0	277	0	251	0	198	0	262	0	244	0	274	0	3.856	0	3.856
4	JERAM SUNGAI ASAHAN	7	2	3	0	3	2	0	6	0	7	0	0	4	0	2	8	3	8	3	5	5	8	856	27	886	8	1.004
5	AIR TERJUN SIMONANG-MONANG	10	0		0	6	0	8	0	0	0	180	0	4	0	15	0	0	0	20	0	5	0	210	0	458	0	458
6	MAKAM TUAN SYECH SILAU	8	0	10	0	5	0	6	0	4	0	150	0	7	0	4	0	3	0	4	0	8	0	47	0	256	0	256
7	ALUN-ALUN RAMBATE RATA RAYA	7.529	0	7.355	0	7.688	0	7.289	0	8.213	0	10.325	0	9.773	0	7.683	0	8.450	0	8.002	0	8.247	0	10.698	0	101.252	0	101.252
8	MESJID AGUNG KISARAN	4.035	0	3.273	0	3.984	7	4.142	0	5.320	0	5.550	0	3.895	0	4.198	0	4.573	0	4.625	0	4.771	0	3.772	0	52.138	7	52.145
9	TAMAN HUTAN KOTA	5.930	0	7.201	0	7.011	0	7.620	0	2.925	0	7.223	0	7.987	0	8.027	3	7.525	0	7.866	0	7.188	0	8.833	0	85.336	3	85.339
10	AIR TERJUN ALAM TANI	32	0	29	0	30	0	15	0	0	0	72	0	50	0	12	0	18	0	8	0	38	0	44	0	348	0	348
11	AIR TERJUN JATUHAN BALOK	14	0	12	0	7	0	5	0	0	0	20	0	7	0	32	0	8	0	15	0	5	0	30	0	155	0	155
12	BEDENG	532	0	425	0	320	0	279	0	115	0	1.000	0	502	0	511	0	417	0	514	0	451	0	1.310	0	6.376	0	6.376
	JUMLAH	19.126	4	19.054	0	20.081	11	20.200	12	17.309	11	27.342	0	23.396	0	21.479	17	22.361	16	21.960	7	21.689	14	27.145	93	261.142	185	261.327

**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA
TAHUN 2018**

No	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)																								SUB JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BULAN																										
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGU		SEP		OKT		NOV		DES		NAS	MN	
		NAS*	MN**	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN			
1	AIR TERJUN PONOT DANAU KELAPA GADING	498	4	312	0	493	2	295	6	344	3	1.259	0	516	0	327	2	324	2	315	4	349	6	558	26	5.590	55	5.645
2	DANAU TERATAI	575	0	412	0	367	0	411	0	445	0	915	0	307	0	329	0	316	0	307	0	301	0	358	0	5.043	0	5.043
3	JERAM SUNGAI ASAHAN	329	0	285	0	229	0	403	0	251	0	974	0	302	0	248	0	208	0	274	0	219	0	284	0	4.006	0	4.006
4	AIR TERJUN SIMONANG-MONANG	5	4	4	0	13	6	2	8	0	0	0	3	5	0	12	9	0	2	0	4	0	0	738	3	779	89	868
5	MAKAM TUAN SYECH SILAU	10	0	12	0	5	0	6	0	0	0	152	0	4	0	3	0	6	0	8	0	8	0	288	0	502	0	502
6	ALUN-ALUN RAMBATE RATA RAYA	22	0	17	0	15	0	50	0	0	0	100	0	30	0	26	0	12	0	18	0	10	0	50	0	350	0	350
7	MESJID AGUNG KISARAN	9.364	0	9.020	0	9.480	0	9.721	2	4.353	0	12.685	0	9.320	0	10.321	0	9.112	0	9.091	0	9.112	0	10.021	0	111.600	2	111.602
8	TAMAN HUTAN KOTA	4.603	5	3.880	0	4.113	0	4.575	0	3.615	0	7.216	0	3.023	0	6.315	0	3.950	0	4.997	0	3.010	0	5.987	0	55.284	5	55.289
9	AIR TERJUN ALAM TANI	7.365	0	7.110	0	4.425	0	4.500	0	5.725	0	17.305	0	4.175	0	4.999	4	4.338	0	4.965	0	4.634	0	18.830	0	88.371	4	88.375
10	AIR TERJUN JATUHAN BALOK	38	0	48	0	25	0	32	0	0	0	62	0	34	0	27	0	30	0	52	0	42	0	65	0	455	0	455
11	BEDENG	16	0	10	0	26	0	28	0	0	0	12	0	11	0	8	0	17	0	12	0	14	0	15	0	169	0	169
12		357	0	289	0	297	0	324	0	258	0	2.345	0	488	0	382	0	422	0	489	0	506	0	1.364	0	7.521	0	7.521
	JUMLAH	23.182	13	21.399	0	19.488	8	20.347	16	14.991	3	43.025	3	18.215	0	22.997	115	18.735	4	20.528	8	18.205	16	38.558	69	279.670	155	279.825

**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

No	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)																								SUB JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BULAN																										
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGU		SEP		OKT		NOV		DES		NAS	MN	
		NAS*	MN**	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN	NAS	MN			
1	AIR TERJUN PONOT	246	3	278	4	260	2	310	8	361	5	1.529	2	1.209	4	654	3	842	5	476	4	656	6	1.255	31	8.076	77	8.153
2	DANAU KELAPA GADING	302	0	384	0	313	0	433	0	432	0	1.008	0	477	0	458	0	566	0	258	0	297	0	753	0	5.681	0	5.681
3	DANAU TERATAI	255	0	208	0	206	0	389	0	287	0	1.227	0	298	0	320	0	732	0	377	0	431	0	568	0	5.298	0	5.298
4	JERAM SUNGAI ASAHAN	4	3	4	5	3	6	4	6	2	2	8	2	2	6	4	3	12	3	5	2	8	2	52	5	108	85	193
5	AIR TERJUN SIMONANG-MONANG	29	0	44	0	35	0	12	0	26	0	248	0	32	0	28	0	48	0	28	0	35	0	277	0	842	0	842
6	MAKAM TUAN SYECH SILAU	17	0	24	0	18	0	62	0	127	0	165	0	69	0	45	0	40	0	25	0	37	0	32	0	661	0	661
7	ALUN-ALUN RAMBATE RATA RAYA	6.032	3	6.113	3	5.700	5	6.458	2	7.342	0	13.068	0	12.857	4	9.753	3	12.349	2	7.352	0	8.211	0	10.265	0	105.500	22	105.522
8	MESJID AGUNG KISARAN	2.578	1	2.945	3	2.610	2	4.876	0	3.879	0	7.698	0	6.588	2	5.784	4	9.566	2	5.479	0	7.681	5	7.386	2	67.070	31	67.101
9	TAMAN HUTAN KOTA	5.097	2	5.224	4	5.077	5	5.798	2	6.531	0	13.476	0	11.967	4	9.566	4	11.989	2	6.892	0	6.934	0	8.896	0	97.447	23	97.470
10	AIR TERJUN ALAM TANI	27	0	36	0	35	0	36	2	28	0	154	2	276	0	288	0	97	0	64	0	49	0	142	0	1.232	4	1.236
11	AIR TERJUN JATUHAN BALOK	9	0	13	0	13	0	34	0	65	0	62	0	41	0	32	0	55	0	14	0	12	0	52	0	402	0	402
12	BEDENG	208	0	223	0	211	0	367	2	288	0	2.766	2	579	0	422	0	456	0	198	0	243	0	376	6	6.337	10	6.347
	JUMLAH	14.804	12	15.496	19	14.481	20	18.779	22	19.368	7	41.409	8	34.395	20	27.354	17	36.752	14	21.168	6	24.594	13	30.054	94	298.654	252	298.906

Sumber :Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan

6. Pandangan Islam Terhadap Pariwisata

Islam memandang pariwisata sebagai bentuk men-tadabburi alam sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap segala sesuatu nikmat yang telah diciptakan Allah SWT, yakni nikmat keindahan alam semesta yang ada di segala penjuru dunia. Islam mengenal istilah safar (perjalanan) untuk senantiasa merenungi dan meningkatkan rasa syukur atas keindahan alam dengan bertujuan untuk meningkatkan rasa keimanan terhadap Allah SWT. Agama Islam mengajarkan agar setiap diperjalanan manusia dimuka bumi ini, harus senantiasa diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.¹²

Didalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sebuah perjalanan (Pariwisata), salah satunya yang telah termaktub di dalam QS Al Mulq Ayat 15 (67:15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالْيَهُ النُّشُورُ

Terjemahan:

“ Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Ketika Allah menyebut “ berjalanlah di muka bumi”, itu artinya Allah mengingatkan kita kepada alam ini, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam ini yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam ini dengan kekhasan yang berbeda-beda. Jadi, dalam

¹² Aisyah Oktarini, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.36.

ajaran islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah:¹³

- a. untuk beribadah seperti haji dan umrah untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang islam
- b. untuk berdakwah dan menyiarkan agama islam
- c. pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya
- d. menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahmatullah berkata : “Adapun berkelana tanpa tujuan tertentu, maka hal itu bukanlah amalan umat ini. Oleh karenanya, Imam Ahmad rahmatullah berkata: „Berkelana (tanpa tujuan) sedikitpun bukan termasuk ajaran agama Islam dan bukan amalan para Nabi dan orang-orang shalih (Masa“il Imam Ahmad 2/176 an-Naisaburi).

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, “Bukanlah maksud dari berkelana adalah seperti pemahaman sebagian orang ahli ibadah yang hanya sekadar berkelana di bumi dan menyendiri di gunung, padang pasir dan goa. Berkelana semacam itu

¹³ Syahriza Rahmi, “Pariwisata Berbasis Syariah : Telaah Makna Kata *Sara* dan Dervasinya dalam Al-quran” FEBI UIN Sumut. Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2014

Akhir-akhir ini, khusus dalam bidang pariwisata di Indonesia, bahkan telah muncul sebuah konsep baru dalam dunia pariwisata, yakni istilah wisata halal. Dilihat dari aspek potensinya sebagai warna baru dan segar untuk dijajaki dan dipromisikan. Hal ini juga telah diperkuat lagi dengan dikeluarkannya fatwa dewan syariah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur dan membahas mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Membangun destinasi wisata halal yang berbasis syariah di Indonesia tidaklah mudah, karena selain relatif baru, juga dibutuhkan sumber daya manusia atau pengelolaan yang profesional dan mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai ajaran syariah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, disamping merupakan peluang yang membutuhkan aksi. Bukankah membangun wisata halal merupakan bagian dari ekspresi membumikan ajaran langit (Tuhan) ke ranah bisnis, sekaligus sebagai wahana menerjemahkan ajaran *rahmatan lil 'alamin* di tengah kehidupan manusia.¹⁴

Pariwisata dalam persepsi Islam haruslah memiliki nilai kandungan dakwah, baik dalam pengelolaannya juga dalam hal sejarahnya dalam sebuah objek wisata.

¹⁴ Djakfar Muhammad “ Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : *Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia* ” , Malang : Uin Maliki Press, 2007

Dalam kajian islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu :¹⁵

a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan obyek wisata rohani.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya, manusia bisa mengungkap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, pengetahuan Sang Pencipta. Kemudian dia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam.

¹⁵ Humaidi Al Ayubi H, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani*, Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008, h.3.

b) **Kajian Terdahulu**

NO	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sitti Nuraleli (2018)	Rancangan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Asahan (Studi Objek Wisata Danau Kelapa Gading)	Kualitatif dengan Pendekatan analisis eksploratoris	Dalam hasil penelitian yang dilakukan, sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Hasil penelitian terfokus kepada satu objek wisata yang berada di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian juga mendapatkan bahwasannya perlunya pengembangan dalam pengelolaan dengan serius di sektor pariwisata Kabupaten Asahan.
2	Annisya Rahmadani (2018)	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten Batu Bara. Penelitian yang dilakukan terhadap seluruh sektor retribusi yang terdapat

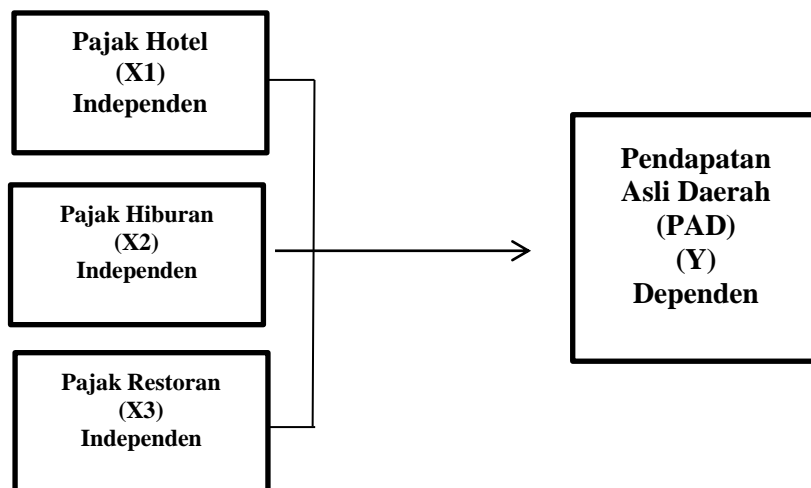
		Daerah Kab. Batu Bara)	angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik.	di Daerah Kabupaten Batu Bara.
3	Faisal Zulmi (2018)	Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Lampung	Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder .Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak lain, baik dari literatur, webiste resmi pemerintahan, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.	

c) Kerangka Teoritis

Yang dimaksudkan dengan kerangka teoritis merupakan sebuah kerangka penalaran yang tersusun atas konsep-konsep atau sebuah teori yang dijadikan sebagai tolak ukur acuan penelitian. Adapun dalam kerangka teoritis dalam skripsi ini yakni kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Unsur-unsur pemasukan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah berasal dari beberapa sektor yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah dan pendapatan yang sah.

Namun, pengkhususan kerangka teoritis dalam penelitian ini lebih terfokus terhadap data sektor pariwisata, seperti halnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Untuk meneliti permasalahan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari sektor pariwisata di Kabupaten Asahan.

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis



d) **Hipotesa**

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus perlu tajam uji lagi, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.¹⁶ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Mengacu dari latar belakang, rumusan masalah serta kerangka konseptual dari penelitian ini, maka dapat ditarik hipotesis sementara dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

H_A : Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan

H_B : Pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan

H_C : Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan

¹⁶ Nanang Martanto. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011). h. 63.

BAB III

METODOLOGI PENNELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya terhadap data-data yang berkaitan dengan angka (data-data numerical) yang kemudian diolah dengan metode statistika, sehingga dapat memudahkan penulis dalam menafsirkan penjabaran data mentah yang ada. Pendekatan deskriptif kuantitaif menggambarkan tentang kontribusi pajak sektor pariwisata di Kabupaten Asahan seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Asahan yang nantinya akan diuji secara empiris dengan menggunakan data sekunder.

Pendekatan kuantitatif disebut juga pendekatan traditional, positivism, eksperimental dan empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis

Penelitian deskripsi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.¹⁷

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu informasi sebagai berikut :

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hal 11

1. Variabel Independent (X_1, X_2, X_3)

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

- a. X_1 Pajak hotel adalah layanan yang semacam tempat penginapan yang disediakan atau disewakan Pemerintah Daerah untuk dipakai kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. X_2 Pajak Hiburan adalah keseluruhan pajak yang bersumber dari tempat hiburan dan wisata yang terdapat di Kabupaten Asahan.
- c. X_3 Pajak Restoran adalah pemasukan daerah yang bersumber dari pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Asahan.

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel Dependent atau variabel terikat yang umumnya menjadi perhatian utama oleh peneliti.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan penerimaan daerah dari sumber-sumber potensi yang ada di wilayah suatu daerah tertentu yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan mengambil data penelitian yang terdapat di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Madong Lubis, Komplek Stadion Mutiara Kota Kisaran – 21223. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini, penulis membutuhkan waktu Bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan¹⁸. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni laporan pajak sektor pariwisata Kabupaten Asahan, berupa pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Asahan.

E. Jenis Data dan Sumber

Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama. Yang berupa wawancara kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan mengenai retribusi sektor pariwisata dengan jenis data kuantitatif. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka dasar pemikiran yang membahas hasil akhir penelitian

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data yang terkait.

Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Di antaranya buku-buku literatur, internet, majalah, atau jurnal

¹⁸ Arfan Ikhsan dan Misri. “*Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*”. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012. h. 142.

¹⁹ Ibid. H. 142.

ilmiah, arsi, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Pada fungsi yang optimal dapat memberikan pemahaman teoritik dan metodologi yang melandasi dalam melakukan penelitian yang benar.

F. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian adalah seluruh pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam demikian, penulis mengambil suatu objek atau sampel pada Dinas Pariwisata Kabupaten melalui tahap wawancara, yang dimana dalam wawancara nantinya akan mempertanyakan beragam tentang data-data terkait penelitian dan pengembangan objek wisata melalui melihat data kepariwisataan yang tersedia di Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang ada yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

1. Wawancara (Interview)

Yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan untuk dapat memberikan keterangan dan menunjukkan bukti-bukti laporan retribusi sektor wisata yang ada. Mengumpulkan data-data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada *survey* pendahuluan dan mengkonfirmasi informasi yang ada pada data.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data atas dokumen-dokumen yang relevan dan sesuai dengan masalah pokok dan materi yang sesuai yang bisa dapat dijadikan rujukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan kontribusi retribusi sektor pariwisata Kabupaten Asahan yang lengkap dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

3. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan objek yang akan diteliti. Kemudian mencatat hasil dari pengamatan tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap kontribusi retribusi sektor pariwisata pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif, adalah metode analisis yang bersifat data-data numerical menggunakan analisis data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga memberikan gambaran masalah yang diteliti.

Metode analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif didasarkan kepada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; pendekatan kuantitatif. Secara garis umumnya, pendekatan kuantitatif lebih terfokus terhadap tujuan generalisasi, dengan menggunakan statistika penelitian. Statistik merupakan catatan angka-angka (bilangan), perangkaan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberikan informasi.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memiliki tugas sebagai pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data yang nantinya akan menyajikan berupa bentuk penyajian yang baik. Beberapa hal yang termasuk ke dalam bagian statistik deskriptif adalah mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan kemudian menyajikannya.²⁰

Analisis statistik deskriptif menggunakan instrumen seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis ini dipergunakan agar memberikan gambaran korelasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.

²⁰ Gujarati, Damodar N, Dasar-dasar Ekonometrika, (Jakarta , Erlangga, 2007), h. 27.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah heteroskedastitas dan autokorelasi. Alat uji yang dipergunakan adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi untuk dapat membandingkan beberapa variabel yang berbeda

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika dapat menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, jika nilai Kolmogrov Smirnov test yang terdapat pada program Eviews 10 distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi $> 0,05$.

Selain itu model lain yang dapat digunakan untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

²¹ Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 156.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model gresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila variabel tak bebas (Y) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X), maka varian dari Y adalah tidak sama. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi $< 0,05$, maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model model regresi linier terdapat korelasi baik hubungan positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel penelitian. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berhubungan dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain gangguan tidak random. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya autokorelasi antara lain adalah kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang saling terkait. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang di estimasikan menjadi bias dan varian minimum, sehingga terjadinya ketidak efisienan.

3. Metode Regresi Linier

Penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda. Statistik parametrik dipergunakan bertujuan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji test ukuran populasi melalui data sampel. Saat sekaraang ini, Metode Regresi salah satu cara yang cukup populer dan sering digunakan. Teknik Regresi digunakan dengan mengkorelasikan historis antara independen dan variabel dependen untuk meramalkan nilai masa depan variabel dependen.

Analisis regresi linear bermaksud agar mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami tingkat kenaikan atau penurunan. Metode ini digunakan untuk memprediksi pengaruh dari suatu variabel terikat (Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran) berdasarkan variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan).²²

Data yang nantinya telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan analisis regresi dengan menggunakan program aplikasi Eviews 10, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel terikat/dependent variabel (Y) berdasarkan satu variabel bebas/independent variabel (X), dalam suatu persamaan.

Persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

²² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam ed.pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 314-315.

β_1 = Koefisien regresi Pajak hotel
 β_2 = Koefisien regresi Pajak Hiburan
 β_3 = Koefisien regresi Pajak Restoran
 X_1 = Pajak hotel
 X_2 = Pajak Hiburan
 X_3 = Pajak Restoran
 e = Nilai residu

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dengan pengaruh variabel-variabel adalah Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian ini menggunakan uji signifikan 0,05 ($\alpha = 0,05$) karena tingkat signifikan tersebut umum digunakan dalam penelitian dan dianggap cukup tepat untuk mewakili variabel yang diteliti.

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_A : Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan

H_B : Pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan

H_C : Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan

a) Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur berapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk dapat mengetahui seberapa pengaruh model-model yang digunakan dalam menghitung total persentase bahwa variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dengan nilai dari koefisien korelasi sendiri dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2)

pada intinya mengukur seberapa model dalam menerangkan variabel terikat jika R² semakin besar (mendekati satu). Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas. Variabel (X₁,X₂,X₃) adalah besar terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R² semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

$$D = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

D = Determinasi

r² = Koefisien Korelasi

b) Uji Statistik t

Uji parsial atau biasa disebut uji merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable, yaitu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yaitu dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan α . atau dapat juga dengan melakukan perbandingan nilai probabilitasnya pada drajat keyakinan tertentu.

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t (Uji Parsial). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jumlah pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dilakukan untuk dapat mengetahui

pengaruh masing-masing rasio keuangan secara individu terhadap minimalisir resiko. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian statistik t antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis (H_A)

H_A diterima : Dapat ditarik sebuah pernyataan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen secara parsial

2. Menentukan tingkat signifikan sebesar 0,05 (5%)

3. Berdasarkan probabilitas. H_A akan diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$

Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien regresinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Asahan

1. Profil Kabupaten Asahan



Gambar 4.1 Logo Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan adalah merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari luas wilayah, luas Kabupaten Asahan adalah 3.732,97 km². Filosofi serta makna arti dari Logo Kabupaten Asahan dapat dimaknai antara lain :

- a. Lambang berbentuk perisai atau tameng menggambarkan kesiapsiagaan rakyat Asahan dalam melindungi Daerah dan Tanah Air dari serangan musuh.
- b. Sudut-sudut bersegi lima, warna kuning emas, melambangkan kehidupan Pancasila di Asahan Tujuh belas buah padi dan 8 buah kapas dan 45 helai daun sirih tersusun adalah melambangkan ciri khas jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Lingkaran padi, bunga kapas dan daun sirih berbentuk tanduk kerbau adalah menggambarkan kerukunan hidup suku-suku yang berdiam di Asahan.
- d. Serumpun rumput Asahan yang spesifik mencerminkan adanya suku-suku bangsa di Asahan.

- e. Empat buah bukit-bukit pegunungan adalah tempat rakyat bergerilya dimasa perang kemerdekaan mempertahankan Republik Indonesia di Asahan dan perlambang kehidupan daerah Asahan dengan 4 tetangga Kabupaten.
- f. Rantai berangkai 5 adalah dasar perikemanusiaan dan persatuan rakyat Asahan.
- g. Roda bergigi 5 melambangkan rakyat Asahan mempunyai keterampilan kerja dibidang pertanian, perkebunan dan pembangunan daerahnya.
- h. Laut biru yang bergaris 3 gelombang ombak melambangkan daerah Asahan terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan pantai sebagai sumber kehidupan rakyat Asahan.
- i. Ikan dan kelapa adalah sumber penghasilan pokok rakyat daerah Asahan dan pembinaan hari depannya.
- j. Pita selendang Asahan melambangkan keindahan, kebudayaan dan adat istiadat Asahan yang spesifik.
- k. Tugu dalam bentuk bambu runcing dan kolam melambangkan perjuangan rakyat Asahan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI Pancasila.
- l. Kerang di pangkal tugu melambangkan kehidupan kenelayanan pengorbanan dan kemasyhurannya.
- m. Bagian atas lambang diletakkan semboyan “Rambate Rata Raya” artinya kerja keras bersama untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Defenisi pemilihan serta makna warna logo Pemerintah Kabupaten Asahan adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Merah, artinya berani, dinamika, cinta tanah air.
- b. Putih, artinya kebenaran, kesucian dan perdamaian.
- c. Hitam, artinya kokoh – teguh.
- d. Hijau tua, artinya keagamaan, kemakmuran, kekeluargaan dan kegotong royongan.
- e. Biru, artinya kesetiaan.

f. Kuning, artinya berbudi, intelegensi, keluhuran dan kesejahteraan.

Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribu kotakan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732 km². Ibu kota Terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai. Kabupaten Asahan, memiliki penduduk berjumlah 774.009 jiwa (Sensus 2017) dengan sebaran 209 jiwa/km². Secara astronomis Kabupaten Asahan berada pada 2°03'-3°26' Lintang Utara, 99°1'-100°0' Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Asahan bersebah dengan Kabupaten Batubara dan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selat Malaka dan Kota Tanjungbalai di sebelah Timur, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebelah selatan, dan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara di sebelah barat. Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan, 27 kelurahan, dan 177 desa.

Pada Desember 2018, Kabupaten Asahan terdiri dari 25 kecamatan. Pada administrasi yang paling bawah, kecamatan terdiri atas kelurahan untuk wilayah perkotaan (urban) dan desa untuk daerah pedesaan (rural). Secara keseluruhan Kabupaten Asahan pada Desember 2018 terdiri atas 204 desa /kelurahan. Berdasarkan jumlah desa, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Kisaran Barat dengan 13 desa, disusul Kecamatan Kisaran Timur, Pulau Rakyat dan Air Batu sebanyak 12 desa dan di posisi ketiga ada Kecamatan Bandar Pulau, Sei Dadap dan Pulo Bandring masing-masing 10 desa. Adapun jumlah wilayah administrasi di Kabupaten Asahan sebanyak 27 kelurahan (13,24 persen) dan 177 desa (86,76 persen) dari jumlah administrasi yang ada di Kabupaten Asahan.

Jika dilihat dari luas wilayah, luas Kabupaten Asahan adalah 3.732,97 km². Distribusi wilayah terluas dari Kabupaten Asahan ditempati oleh Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan luas 19,11 persen dari wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Sei Kepayang 9,93 persen dan Kecamatan Aek Songsongan dengan luas 7,55 persen dari luas keseluruhan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah

paling kecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 0,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Asahan.²³

2. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan

Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2016 mengenai tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten asahan, tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang meliputi pengembangan pembinaan, pelayanan umum, pemasaran, pengawasan /pengendalian perizinan pariwisata, pemuda dan olahraga dan melaksanakan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

a. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- 1) Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan

“ Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri”

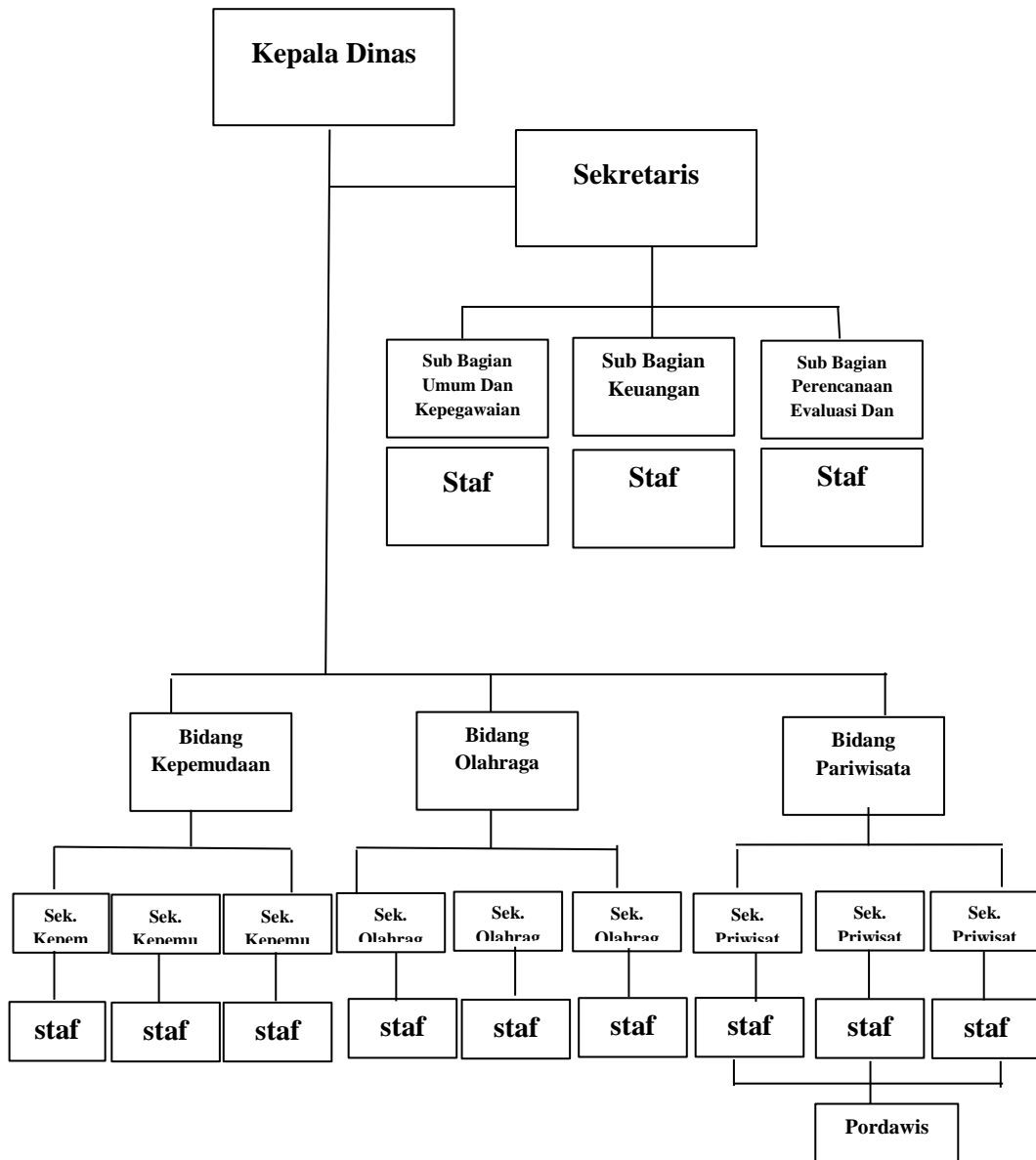
- 2) Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan
 - a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis imtaq.

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan Tahun 2018

- b) Meningkatkan pelayanan dan kesadaran kesehatan masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan.
- d) Mengembangkan pola pembangunan yang partisipatif, proaktif kreatif dan inovatif dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan di tengah kompetisi global.
- e) Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal.
- f) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan.
- g) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan.
- h) Mendorong terciptanya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.
- i) Meningkatkan daya saing pertanian dalam arti luas.
- j) Melakukan percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah yang dipadukan dengan koperasi dan UKM, Pariwisata, Perdagangan, industri pembangunan pasar tradisional dan modern.

b. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Asahan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahra Kabupaten Asahan



B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini dan dilakukan deskripsi maka diperlukan adanya pengujian atas data yang telah ada yang bertujuan agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear sederhana, uji normalitas, koefisien determinasi dan uji t. Berikut merupakan penyajian data Pajak Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2) , dan Pajak Restoran Kabupaten Asahan (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Asahan.

2. Deskripsi Data Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan sebagai untuk dapat mengetahui deskripsi suatu data yang ditinjau dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) serta nilai standart deviasi. Analisis ini akan menjelaskan perhitungan statistik deskriptif adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dibawah ini menjelaskan bahwa diperoleh sampel uji bahwasannya nilai standar deviasi pajak hotel dan pajak hiburan lebih tinggi dari nilai rata-rata (mean), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kecilnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data jumlah pajak hotel dan hiburan.

Sedangkan nilai standar deviasi pajak restoran lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) pajak restoran dapat diinterpretasikan bahwa kecilnya simpangan data menunjukkan rendahnya fluktuasi dari data jumlah penerimaan yang bersumber dari pajak restoran.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Pajak Hotel, Pajak Hotel Hiburan Wisata, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan

	Y	X1	X2	X3
Mean	12.0992	2.90	5.38	8.86
Median	12.1593	3.07	2.62	7.80
Maximum	15.0004	3.60	2.456	2.032
Minimum	9.15866	2.04	4	4.85
Std. Dev.	1.88221	6.4	6.47	4.15
Skewness	-0.054809	-0.203350	1.548561	1.196598
Kurtosis	1.745963	1.253297	4.357273	3.595359
Jarque-Bera Probability	4.027587	8.174954	29.06231	15.45800
	0.133481	0.016782	0.000000	0.000440
Sum	73.8050	17.7041	32.8443	54.0162
Sum Sq. Dev.	2135999	24260.9	205097	1045651
Observations	61	61	61	61

Berdasarkan Data Tabel Statistik Deskriptif diatas menunjukan bahwa :

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan adalah memiliki nilai minimum 9,15 , nilai rata-rata 12.1 dan memiliki nilai standar deviasi 1,88.
- b. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai minimum 0,02, nilai rata-rata 0,03 dan memiliki nilai standar deviasi 0,006.
- c. Variabel Pajak Hiburan memiliki nilai minimum 0,004, nilai rata-rata 0,02 dan memiliki nilai standar deviasi 0,06.
- d. Variabel Pajak Restoran memiliki nilai minimum 0,04, nilai rata-rata 0,07 dan memiliki nilai standar deviasi 0,04.

3. Uji Asumsi Klasik

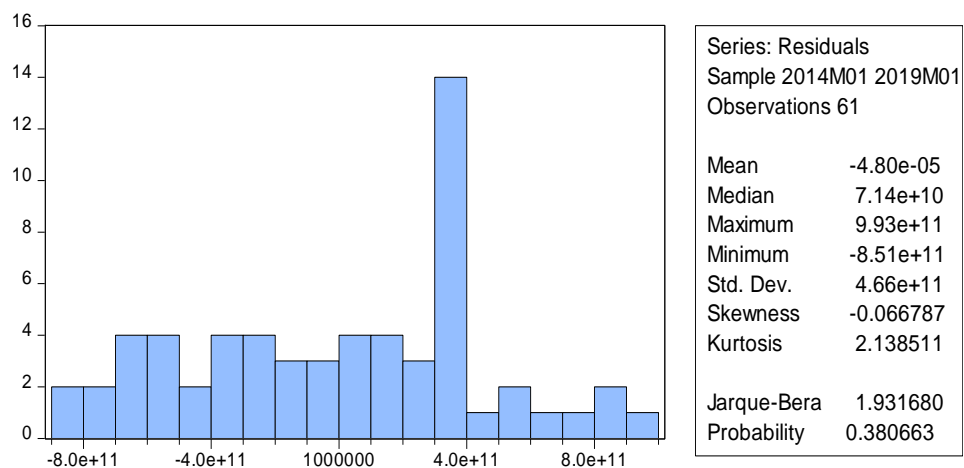
Uji asumsi klasik penting dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikannya terdapat penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan mengenai data tidak menjadi efisien.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji tt dan ff mngasumsikan bahwa jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji probabilitas dari statistik Jarque-Bera (J-B), dengan ketentuan :

Jika Nilai probabilitas $pp > 0,05$, maka asumsi normalitas diterima, namun jika nilai probabilitas $pp < 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Setelah melalui operasi aplikasi Eviews 9

Berdasarkan gambar 4.2 diatas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera (J-B) sebesar 1,93 , sedangkan nilai probabilitas $pp (\alpha)$ sebesar 0,38.

Dapat ditarik kesimpulan berdasar uji normalitas diatas bahwa $0,38 > 0,05$, dengan berarti bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskeditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskeditas dan jika berbeda disebut heteroskeditas. Deteksi ada tidaknya heteroskeditas dapat dilakukan dengan uji white. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat angka probabilitas dari uji White dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared $>0,05$. Maka tidak terjadi heteroskeditas, namun jika nilai Prob. Chi-square dari obs R- squared $<0,05$. Maka terjadi heteroskeditas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.250256	Prob. F(3,57)	0.0923
Obs*R-squared	6.459480	Prob. Chi-Square(3)	0.0913
Scaled explained SS	4.467693	Prob. Chi-Square(3)	0.2152

Test Equation:
 Dependent Variable: ARESID
 Method: Least Squares
 Date: 07/30/20 Time: 10:48
 Sample: 2014M01 2019M01
 Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.39E+11	3.28E+11	1.336305	0.1868
X1	37.49570	17.77855	2.109042	0.0393
X2	9.568630	7.052658	1.356741	0.1802
X3	-18.60063	12.83134	-1.449624	0.1526

R-squared	0.105893	Mean dependent var	3.95E+11
Adjusted R-squared	0.058835	S.D. dependent var	2.42E+11
S.E. of regression	2.34E+11	Akaike info criterion	55.26161
Sum squared resid	3.13E+24	Schwarz criterion	55.40003
Log likelihood	-1681.479	Hannan-Quinn criter.	55.31586
F-statistic	2.250256	Durbin-Watson stat	0.218632
Prob(F-statistic)	0.092260		

Sumber = Data setelah operasi aplikasi e-views 10

Berdasarkan tabulasi dari tabel diatas,, bahwasanya hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai Probability Obs* R-Square 6,45 , maka H_0 diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi merupakan suatu uji untuk memeriksa apakah untuk setiap dua pengamatan residual saling berkolerasi atau tidak, autokolerasi tidak terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu yang satu dengan yang lainnya. Meskipun terjadinya autokorelasi terhadap estimator-estimator yang dihasilkan oleh metode ordinary least square (OLS) tetap tak bias, konsisten, dan terdistribusi normal secara asimtosis, namun, namun estimator-estimator tersebut tidak lagi efisien. Sebagai akibatnya, pada uji t,F, dan chi kuadrat tidak lagi sah untuk digunakan. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokolerasi dengan uji Breusch-goldfrey (BG Test). Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai prob. Chi-Square dari Obs *R-squared . 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi
- Jika nilai prob. Chi-Square dari Obs *R-squared . 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4,3 Uji Autokorelasi dengan Uji Breusch-Pagan-Gidfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	306.3504	Prob. F(2,55)	0.0000
Obs*R-squared	55.97529	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/30/20 Time: 10:57

Sample: 2014M01 2019M01

Included observations: 61

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.68E+11	2.04E+11	1.310389	0.1955
X1	24.12420	11.69460	2.062850	0.0439
X2	7.988714	4.524247	1.765755	0.0830
X3	-15.87486	8.334104	-1.904807	0.0620
RESID(-1)	1.231487	0.128613	9.575148	0.0000
RESID(-2)	-0.273840	0.134976	-2.028802	0.0473
R-squared	0.917628	Mean dependent var	-4.80E-05	
Adjusted R-squared	0.910139	S.D. dependent var	4.66E+11	
S.E. of regression	1.40E+11	Akaike info criterion	54.25577	
Sum squared resid	1.07E+24	Schwarz criterion	54.46340	
Log likelihood	-1648.801	Hannan-Quinn criter.	54.33714	
F-statistic	122.5402	Durbin-Watson stat	1.436167	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data penelitian setelah dioperasikan aplikasi eviews 10

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, keputusan hasil terjadi atau tidaknya autokorelasi dilihat melalui nilai Prob. F_{hitung} . Apabila nilai Prob. F_{hitung} lebih besar dari tingkat α 0,05 (5%) maka tidak terjadi autokorelasi, namun apabila nilai Prob $F_{hitung} < \alpha$ 0,05 (5%) maka terjadi autokorelasi. Dari uji autokorelasi diatas dapat dilihat nilai Prob. F_{hitung} sebesar $0,0000 < \alpha$ 0,05 (5%) yang artinya terjadi autokorelasi.

c. Metode Regresi Linear

Analisis Regresi Linear yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah berfungsi untuk mengetahui hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Metode regresi linear dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda karena terdapat beberapa variabel independent. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan melalui statistik menggunakan operasi eviews 10, maka diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 43
Metode Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/30/20 Time: 11:02
Sample (adjusted): 2014M01 2019M01
Included observations: 61 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.45E+12	6.70	5.149562	0.0000
X1	61.42983	36.25355	1.694450	0.0006
X2	47.65731	14.38159	-3.313771	0.0016
X3	106.5304	26.16533	4.071431	0.0001
R-squared	0.938747	Mean dependent var	1.21	
Adjusted R-squared	0.935523	S.D. dependent var	1.88	
S.E. of regression	4.78E+11	Akaike info criterion	56.68670	
Sum squared resid	130	Schwarz criterion	56.82512	
Log likelihood	-1724.944	Hannan-Quinn criter.	56.74095	
F-statistic	291.1873	Durbin-Watson stat	0.057369	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data setelah diolah Eviews 10

Persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Pajak hotel

β_2 = Koefisien regresi Pajak hiburan

β_3 = Koefisien regresi Pajak restoran

X_1 = Jumlah Hotel

X_2 = Jumlah Hiburan

X_3 = Jumlah Restoran

e = Nilai residu

Model Persamaan Linear Regresi Berganda diatas berarti :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$
$$= 3.45 + 61.42983 X_1 + 47.65731 X_2 + 106.5304 X_3 + e$$

Maka koefisien β dinamakan arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X_1, X_2, X_3 sebesar satu-satuan. Perubahan ini merupakan penambahan nilai β bertanda positif dan penurunan bila β bertanda negative. Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 3.45 yang berarti bahwa jika Pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan (bernilai tetap) maka nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan akan bernilai tetap sebesar 3.45
- Koefisien regresi X_1 sebesar 61.42983, hal ini menyatakan bahwa jika pajak hotel di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan sebanyak Rp.

- 1, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 61.429.830
- c. Koefisien regresi X_2 sebesar 47.65731, hal ini berarti jika pajak hiburan di Kabupaten Asahan mengalami penurunan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar 47.657.310
- d. Koefisien regresi X_3 adalah sebesar 106.5304, menyatakan bahwa jika pendapatan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 10.653.040.

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan analisis koefisien determinasi pengujian uji signifikansi koefisien regresi Parsial secara individual (uji t) dan pengujian signifikansi koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan (uji F) nilai-nilai statistik dari koefisien determinasi, uji f dan uji t tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Nilai-Nilai Statistik dari Koefisien Determinasi Uji R^2 , dan Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 07/30/20 Time: 11:02
 Sample (adjusted): 2014M01 2019M01
 Included observations: 61 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.45E+12	6.70E+11	5.149562	0.0000
X1	61.42983	36.25355	1.694450	0.0006
X2	47.65731	14.38159	-3.313771	0.0016
X3	106.5304	26.16533	4.071431	0.0001
R-squared	0.938747	Mean dependent var		1.21E+13
Adjusted R-squared	0.935523	S.D. dependent var		1.88E+12
S.E. of regression	4.78E+11	Akaike info criterion		56.68670
Sum squared resid	1.30E+25	Schwarz criterion		56.82512
Log likelihood	-1724.944	Hannan-Quinn criter.		56.74095
F-statistic	291.1873	Durbin-Watson stat		0.057369
Prob(F-statistic)	0.000000			

a. **Model R²**

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi R² yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi R² yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel bebas. Berdasarkan tabulasi tabel diatas dapat dilihat hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Diketahui nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar R² = 0.938747. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak hotel di Kabupaten Asahan mampu mempengaruhi/ menjelaskan laju pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan secara simultan atau bersama-sama sebesar 93,8% sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi faktor-faktor lainnya.

b. **Uji t**

Uji signifikansi koefisien regresi parsial secara individu merupakan suatu uji untuk menguji apakah nilai dari koefisien regresi parsial secara individu bernilai nol atau tidak . Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas P atau siq. Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni α . Jika nilai probabilitas P > tingkat signifikansi yang digunakan, dalam penelitian ini $\alpha = 0,05$ (5%), maka nilai koefisien regresi parsial $B_i = 0$. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikansi secara statistik pada tingkat 0,05 (5%). Namun jika nilai probabilitas P. tingkat signifikansi yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial $B_i \neq 0$. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel

pertumbuhan ekonomi signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% (0,05).

Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Hipotesis :

H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > 0.05 atau $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.

Jika probabilitas < 0.05 atau $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak .

c. Keputusan

1) Pada tabel diatas nilai sig variabel $X_1 = 0.0006 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X_1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya.

2) Nilai sig untuk variabel $X_2 = 0.0016 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X_1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya.

3) Sedang untuk nilai sig variabel $X_3 = 0.0001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X_1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian persamaan estimasinya adalah :

$$Y = 3.45E+12 + 61.42983 + 47.65731 + 106.5304 x$$

- 1) Setiap kenaikan Pajak Hotel di Kabupaten Asahan sebesar satu-satuan (1%), maka Pendapatan Asli Daerah naik sebesar **61.429.830**
- 2) Setiap penurunan Pajak hiburan di Kabupaten Asahan sebesar satu-satuan (1%), maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan menurun sebesar **47.657.310**
- 3) Setiap kenaikan Pajak restoran di Kabupaten Asahan sebesar satu-satuan (1%), maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar **10.653.040**

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan melalui uji hipotesis yang telah dilakukan diatas, telah diperoleh melalui uji koefisien determinasi (R^2), bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran mempengaruhi melalui uji regresi sebesar 0,938 sisanya sebesar 0,062 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil uji linier berganda, diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Asahan. Koefisien regresi variabel Pajak hotel sebesar 61.42983 yang menyatakan bahwa jika Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.429.830. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terdapat korelasi hubungan yang positif antara Pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan, semakin naik peningkatan pajak hotel maka akan berdampak pula terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Secara signifikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan. Pajak hotel secara parsial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan, yang ditunjukkan nilai signifikansi pada tabel diatas nilai sig variable $0.0006 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, setelah melalui uji t.

2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil uji linier berganda, diketahui bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Asahan. Koefisien regresi variabel Pajak hiburan sebesar 47.65731 yang

menyatakan bahwa jika Pajak Hiburan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 47.657.310. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan, semakin naik peningkatan pajak hiburan maka akan berdampak pula terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan secara parsial Nilai sig untuk variabel adalah $0.0016 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menandakan bahwa pajak Hiburan secara parsial memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Asahan.

3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil uji linier berganda, diketahui bahwa Pajak Restoran juga memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel PAD Kabupaten Asahan. Koefisien regresi variabel Pajak restoran adalah sebesar 106.5304, hal yang semacam ini berarti yang menyatakan bahwa jika Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.653.040. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terdapat korelasi hubungan yang positif antara Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan, semakin naik peningkatan pajak restoran maka akan berdampak pula terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sedang untuk nilai signifikansi pajak restoran adalah nilai sig untuk variabelnya adalah $0.0001 < 0,05$, sehingga hal ini mengartikan H_0 ditolak, dan dapat diartikan Pajak Restoran di Kabupaten Asahan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Variabel Independen (Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran) terhadap Variabel Dependen (PAD Kabupaten Asahan)

Berdasarkan uji model R^2 determinasi (R-square) sebesar $R^2 = 0.938747$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Asahan adalah sebesar 93,8% adapun sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam pembahasan objek penelitian ini.

Sedang jika berdasarkan hasil uji hipotesis uji t yang dilakukan mengungkapkan bahwasannya hanya nilai sig variabel independen = $0.000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti hanya variabel independen yang memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. Yang berarti menandakan variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y, maka semakin tinggi nilai yang didapatkan melalui variabel X, akan membuat variabel Y semakin tinggi juga, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian dapat ditarik persamaan estimasinya antara lain sebagai berikut :

$$Y = 3.45E+12 + 61.42983 - 47.65731 + 106.5304 x$$

Penjelasannya antara lain :

1. Nilai C (Konstanta) pada variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) adalah memiliki nilai sebesar 3.45 yang berarti bahwasannya tanpa variabel bebas, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan mengalami penurunan sebesar 34,5 %
2. Koefisien Regresi X_1 adalah sebesar **61,4** yang berarti bahwa tiap peningkatan Pajak Hotel di Kabupaten Asahan sebesar 1% unit akan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 61.429.830

3. Koefisien Regresi X_2 adalah sebesar **-47.6**, hal ini menandakan bahwa tiap kali terdapat penurunan Pajak Hiburan di Kabupaten Asahan sebanyak 1% akan menurunkan PAD sebesar Rp. 47.657.310.
4. Koefisien Regresi X_3 adalah sebesar **106.5304**, hal ini menandakan bahwa tiap kali terdapat peningkatan sebanyak 1% pajak restoran yang berada di Kabupaten Asahan, akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.653.040, begitu juga sebaliknya.

Sebagai indikator pendukung guna memperkuat hasil penelitian yang telah diperoleh diatas, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada bagian kepala seksi bidang kepariwisataan kabupaten Asahan Ibu Fifi yang menyatakan jika aspek pajak yang memiliki keterkaitannya dengan aspek bidang pariwisata seperti halnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan juga merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. Pajak yang diperoleh dari aspek Perhotelan, Hiburan serta restoran juga mempengaruhi peningkatan pengunjung yang menikmati objek pariwisata yang terdapat di Kabupaten Asahan. Seperti halnya objek wisata buatan yang dikelola baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh masyarakat swasta juga mampu menambah pemasukan baik itu pajak khususnya dan juga pemasukan retribusi di Kabupaten Asahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang sudah peneliti lakukan, mengacu dengan itu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Asahan berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan secara parsial. Apabila pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.429.830.
2. Kontribusi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Asahan berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan secara parsial. Apabila pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah, maka hal ini akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan sebesar Rp. 47.657.310.
3. Kontribusi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Asahan berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan. Apabila terdapat peningkatan pajak restoran sebesar 1 Rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan sebesar Rp. 10.653.040.
4. Pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak hotel di Kabupaten Asahan mampu mempengaruhi/ menjelaskan laju pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan secara simultan atau bersama-sama sebesar 93,8% sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Artinya bahwa peningkatan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran mampu dalam mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Asahan

B. Saran

Peneliti dapat memberikan beberapa saran dan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60, dari data 5 tahun dengan menggunakan data perbulannya, sehingga hasil penelitian ini tidak menggambarkan secara general terhadap faktor-faktor lainnya yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat hasil yang lebih akurat.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya ada 3 variabel independen sehingga penelitian belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. Peneliti dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lebih banyak.
3. Penelitian ini dilakukan dalam periode tahun dari 2015 sampai 2019 disebabkan akses data yang terbatas. Untuk itu, peneliti dapat memberikan saran agar dapat menambah periode waktu penelitian agar dapat melakukan generalisasi terhadap penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tiara Apriani Putri Jessy, “*Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata*”, *Journal Administrasi Negara*, Vol.5
- Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*
Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2016
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam ed. pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Abdul Halim, *Rumus Kontribusi*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, 2001
- Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2006
- Nanang Martanto. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011
- Djakfar Muhammad, *Pariwisata Halal Perpektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia* , Malang, Uin Maliki Press, 2007
- Humaidi Al Ayubi H, *Fungsi dan Kegiatan Masjid Dian Al Mahri sebagai Obyek Wisata Rohani*, (On-Line) Program Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008

- Muhammad Luthfi, “Pengembangan Pariwisata dan Dampak Sosial Ekonomi di Bandar Lampung”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol.2 No.1
- Tiara Apriani Putri Jessy, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata”, *Journal Administrasi Negara*, Vol.5 No.3
- Julianda, Azuar & Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Khadafi, Muammar, dkk. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochman. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Silalahan, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supangat, Andi. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
**DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**

Jln. Madong Lubis, Komplek Stadion Mutiara, Telp/Faks. (0623) 43358, Kisaran – 21223
email : dispورا@pemkab-asahan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/853

Menerangkan Bahwa :

Nama : Mhd. Syahfriardan
Nim : 52151009
Tempat/ Tgl Lahir : Suka Jadi / 18 November 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Smester /Program Studi : IX (sembilan) / Akuntansi Syariah
Alamat : Afd.IV Rawa Bening Perk. Teluk Dalam Dusun II Kec. Teluk Dalam
Kel. Perk Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam

Bahwasannya nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan dengan judul Skripsi Analisis Pengaruh Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

An. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIS



BAKHRUM. ST. M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19640830 198912 1 002

Tembusan :
1. Kepala Disporapar (sebagai laporan)



TX 5063

TX 5063

TX 5063

KETERAMPILAN TEKNIS

- Rangkaian pengeditan film (program standar industri)
- Pengoperasian kamera - Sinematografi
- Pengoperasian MS Word, MS Excel, MS Presentation
- Indonesian Speaking, English Speaking
- Leadership

MARI BERBINCANG:

085275489882 JL. Sei Kera Hulu, No 308
Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara
muhammadsyahfriardan@gmail.com
www.otakkutu.blogspot.com
Twitter: @syf.rdn

REFERENSI LANJUT:



instagram.com/this.dn



facebook.com/syahfriardan



youtube.com/DANsudahsaatnya

Mhd. Syahfriardan

Mahasiswa Akuntansi Syariah

TENTANG SAYA:

Saya merupakan seorang yang memiliki tingkat komunikasi dan kepercayaan diri yang baik. Inovasi dan kreativitas merupakan modal dasar saya dalam bekerja bersama team. saya banyak mengikuti organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan untuk melatih keterampilan dan jiwa sosial saya. Saya pekerja keras, rajin, dan berdedikasi serta kualitas yang saya berikan dalam segala hal yang saya lakukan.

PENGALAMAN KERJA

SKPP Bawaslu RI

Penyiar Radio Al-Fatih 107.3 FM

Magang Lazismu Kota Medan

Magang Dompot Dhuafa Cab. Sumatera Utara

INFO PENDIDIKAN

2012 - Mts Bustaanul Uluum

2015 - MAN Asahan Jurusan IPA

2015 - UINSU Akuntansi Syariah

INFO ORGANISASI

2018-2019 Ketua Umum PK IMM FEBI UINSU

2019-2020 Ketua Bidang Riset Pengembangan Keilmuan PC IMM KOTA MEDAN

2018-2020 Ketua Bidang PSDM Ikatan Komunikasi Mahasiswa Asahan

2019-2020 Ketua Bidang KOKAM Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Tegal Sari II

INFO PENGHARGAAN

2018 - Duta Wisata Asahan RU 1

2019 - Duta Wisata Asahan The Best Catwalk

2018 - Kontributor Penulis Aktif IBTimes.id dan tajdid.id

2020 - Peserta Lomba Esai Staff Khusus Presiden

INFO PERKADERAN INFORMAL

2019 - DAARUL ARQAM MADYA PC IMM KOTA TANGERANG

2019 - Pelatihan Instruktur Pemuda Muhammadiyah Wilayah Sumut